

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau yang juga disebut dengan public relation ini salah satu bagian dari suatu organisasi, pemerintahan, dan perusahaan lainnya yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan dan juga kerja sama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas ini yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat bagi organisasi maupun publik. International Public Relations Association (IPRA) berkata bahwa pengertian humas adalah fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan didalam organisasi induk ataupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mencari simpati, pengertian serta dukungan dari pihak terkait. Menurut pakar komunikasi Dr. Jalaludin Rahmat dan Dr. Dedy Mulyana, MA mengatakan bahwasannya humas berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan. Melalui kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak, yakni berupa perubahan yang positif. Dengan demikian, humas adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik itu bersifat komersial maupun nonkomersial, pemerintah maupun pihak swasta. Fungsi humas pada umumnya membantu mendidik, memberikan informasi, membangkitkan ketertarikan masyarakat, merencanakan strategi untuk meraih simpati hingga membuat masyarakat mengerti. Terutama di era seperti ini, informasi sangat dibutuhkan, dan peran humas disini berperan penting sebagai layanan publik untuk memberikan wawasan informasi yang jelas dan sesuai fakta yang ada di perusahaan, organisasi, ataupun pemerintahan dengan cara yang baik dan benar agar dapat diterima publik. Fungsi humas yang utama merupakan melaksanakan upaya – upaya untuk menumbuhkan, memelihara, membangun citra. Dalam hal ini bisa menyangkut citra positif dan mengenai citra kondisi Negara dan bangsa, citra kebijakan pemerintah, citra partai politik, dan citra perusahaan beserta produk – produknya, sampai kepada citra

perorangan. Tujuan humas yakni pencapaian citra yang diharapkan dan pemeliharaan citra positif yang sudah berjalan (Teuku May Rudy, 2005 : 77 – 81).

Untuk berkomunikasi dengan publik, humas juga mendekati diri dengan media, baik iklan, media social, media massa, ataupun dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan organisasi, pemerintahan, ataupun perusahaan terkini. Tidak hanya itu, beberapa humas juga terkadang menyiapkan contact center yang diperuntukkan bagi stakeholder atau masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaannya dibidang layanan organisasi. Selain itu humas juga berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini – opini publik yang berkaitan dengan organisasi, pemerintahan maupun perusahaan, serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai fakta, disampaikan dengan cara – cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini public ke arah yang diharapkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti media yaitu alat (sarana) komunikasi, seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster. dan spanduk. Kemudian, media massa merupakan sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Mungkin tidaklah asing jika disebutkan bahwa koran, majalah, radio, atau televisi sebagai media. Hanya saja pemahaman ini hanya berhenti pada definisi yang ditawarkan oleh Laughey (2007: 1), sebagai teknologi yang mengomunikasikan pesan kepada khalayak yang berada dalam lokasi, Negara, atau bahkan bagian dunia yang berbeda. Sebagaimana juga yang dijelaskan Luhmann (2000:2) bahwa apa yang disebutkan itu, pada dasarnya lebih dikenal sebagai media massa yang berarti tidak adanya interaksi, diantara pengirim pesan dan penerima pesan. Karena peran media juga sangat penting untuk mendukung kinerja humas, untuk sarana informasi. Media itu sendiri merupakan sarana untuk menyampaikan isi pesan, pernyataan, informasi, kepada publik, yang tinggalnya menyebar, heterogen, anonym, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama yaitu pesan dari media massa yang sama dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. (Rulli Nasrullah, 2014 : 4).

Dari berbagai definisi, peran, dan fungsi humas, tidak luput kemungkinan kelembagaan milik pemerintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai bidang kehumasan juga menggunakan media massa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum atau bertanggung jawab dalam pemilihan umum mulai dari pemilihan bupati, gubernur, sampai presiden. Di dalam pemilihan, ada berbagai syarat tertentu untuk bisa memilih kandidat yang akan dipilih. Syaratnya yakni sudah mempunyai Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk, minimal berumur 17 tahun, dan sudah menikah. Di Indonesia sendiri yang dimana disebut sebagai Negara demokrasi ini, karena demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Maksudnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka artisipasi pemilu harus diterjemahkan sebagai hak – hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, Indonesia sebagai Negara yang mengakui bahwa rakyat adalah pemegang tertinggi kedaulatan, maka Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk system kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat. Pemilu dianggap memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu Negara yang menganut kedaulatan rakyat. Pemilu juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan kaedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luberjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 1945. (Amin Suprihatini, 2008 : 3).

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksudkan adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Pemilihan kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai pemilik legitimasi untuk berpartisipasi dalam proses politik yang dapat dilihat dari keikutsertaannya memberikan suara pada saat pemilihan

berlangsung. Masyarakat dengan partisipasi politiknya menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tingkat partisipasi masyarakat pada waktu pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari tolak ukur idealnya sebuah demokrasi. Antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa demokrasi menjadi semakin maju. Hal ini membuktikan bahwa adanya kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya permasalahan politik dan tergerak untuk ikut ambil bagian dalam proses demokrasi politik. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat rendah menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah kenegaraan. Agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah menghasilkan pemerintahan yang demokratis dan mendapat legitimasi sah dari rakyat maka diperlukan lembaga independent sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyelenggarakan pemilihan bupati beserta wakilnya. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan menjadi tolak ukur idealnya demokrasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memiliki peran mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. (Sirajul Munir, 2016 : 3 – 5).

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang memiliki tugas untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Lumajang. Upaya meningkatkan partisipasi politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan jika dilihat dari era sebelumnya. Yang dimana dari 70% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 74% pada tahun 2018. Upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dan menekankan partisipasi sudah dilakukan dengan sosialisasi, media massa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Karena idealnya semakin tinggi demokrasi, maka semakin tinggi pula angka partisipasi dalam pemilihan umum.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018?
- 1.2.2. Bagaimana pengaruh media massa peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018?
- 1.2.3 Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang pada tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada pilkada di Kabupten Lumajang tahun 2018.
- 1.3.2 Mengetahui pengaruh media massa dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018.
- 1.3.3 Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018.

1.4 Kerangka Pemikiran

Peneliti ingin mengetahui peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial di Kabupaten Lumajang tahun 2018. Bagaimana peran humas terhadap peningkatan hak suara masyarakat dengan adanya Pilkada ini sehingga meningkat dari tahun 2013 ada 70% dan tahun 2018 menjadi 74%. Apakah sudah efektif, dan mengetahui cara humas mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat mampu menyuarakan hak suaranya. Untuk meningkatkan dan membantu peran humas, ada anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang seperti sama – sama komisioner, sekretaris, dan subag – subag beserta jajarannya. Humas juga didukung oleh media –

media. Media yang digunakan yaitu media elektronik, media online, dan media cetak.

Media – media tersebut terlahir dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sangat banyak, karena tujuan media menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tapi meskipun dengan banyaknya media, media tidak mempunyai hak merubah peraturan – peraturan yang ada. Dan bagaimana peran humas mengatasi kendala – kendala jika ada media yang tidak sesuai dengan fakta.

Selain ingin mengetahui tentang peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Lumajang tahun 2018, dan juga ada beberapa media, ada faktor – faktor yang mempengaruhi peran humas. Yaitu lokasi, sarana dan prasarana, dan teknis sosialisasi. Faktor – faktor tersebut juga mempengaruhi peningkatan hak suara.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan apa yang ada dalam teori dan bagaimana bukti – bukti yang ada di lapangan yang mengarah ke kesesuaian dan kebenaran atau fakta yang ada. Dalam hal ini adalah peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018.

1.5 Hipotesis

- 1.5.1 Peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018.
- 1.5.2 Media yang mempengaruhi peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di Kabupaten Lumajang tahun 2018 adalah media cetak, media online, dan media elektronik.
- 1.5.3 Faktor – faktor yang berpengaruh pada peran humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial pada Pilkada di kabupaten Lumajang tahun 2018 yaitu lokasi, sarana dan prasarana, dan teknis sosialisasi.

1.6 Manfaat penelitian

- 1.6.1 Meningkatkan pengetahuan tentang peran humas karena akan memperoleh wawasan tentang peranan humas.
- 1.6.2 Bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi pembaca.
- 1.6.3 Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan penelitian tentang peran humas.

